

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, April 2016
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- , Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Herlien Budiono, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 148
- Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Kons titusional Warga Negara", Jurnal Konstitusi 15, no 4 (2019): 796–815: 1
- Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hal.. 4.
- Nandang Alamsyah, Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan, UNPAD Press, Bandung, Hlm. 18
- Philipus M Hadjon (et.all), Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2012), Hlm 16.
- R.Soesanto, Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.75.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, 2005.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, cetakan pertama, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

## **2. Jurnal/Artikel**

Arliman S., 2017, Hak Ingkar (Verschoningsplicht) atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Vol 1 No 1, Jurnal umPalembang, STIH Padang.

Didit Wardio, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman

Endah Sumiarti, Djodi Suranto, dan Yennie K. Milono, Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum.

Ghansham Anand en Syafruddin Syafruddin, Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan, Lambung Mangkurat Law Journal 1, no 1 (2016): 94-97.

Irfan Iryadi, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perpektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal RechtsVinding 9, no 3 (2020): 493.

## **3. Peraturan/Undang-Undang**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Undang  
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
M.02.PR.08.10 Tahun 2004

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis  
Kehormatan Notaris